



# **Trend Pemberantasan Korupsi 2013**

# Pembahasan

1. Sumber data dan periode pemantauan
2. Penindakan perkara korupsi 2013
3. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi
4. Kesimpulan
5. Rekomendasi



# Waktu dan Metode Pemantauan



- Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013.
- Data bersumber dari:
  - a. Media massa, *online* maupun cetak.
  - b. Website aparat penegak hukum (Kepolisian – Kejaksaan dan KPK).
  - c. Permintaan informasi ke aparat penegak hukum.
  - d. Laporan masyarakat serta informasi dari mitra lokal ICW
- Kasus yang terpantau adalah;
  - a. Kasus dugaan korupsi yang berada pada tahap penyidikan (sudah ada penetapan tersangka).
  - b. Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selama Januari s/d Desember 2013.

# Tujuan Pemantauan



- Menjelaskan kerja pemberantasan korupsi sepanjang 2013, khususnya bidang penindakan oleh aparat penegak hukum (apgakum, yaitu: kepolisian – Kejaksaan – KPK).
- Memetakan perkara korupsi yang ditangani Apgakum selama 2013.
- Pemetaan melingkupi: sektor korupsi, modus korupsi, klasifikasi jabatan pelaku (aktor), potensi kerugian, wilayah dan waktu terjadinya, serta aparat penegak hukum yang menanganinya.
- Memberikan catatan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi
- Menghasilkan rekomendasi kepada apgakum.

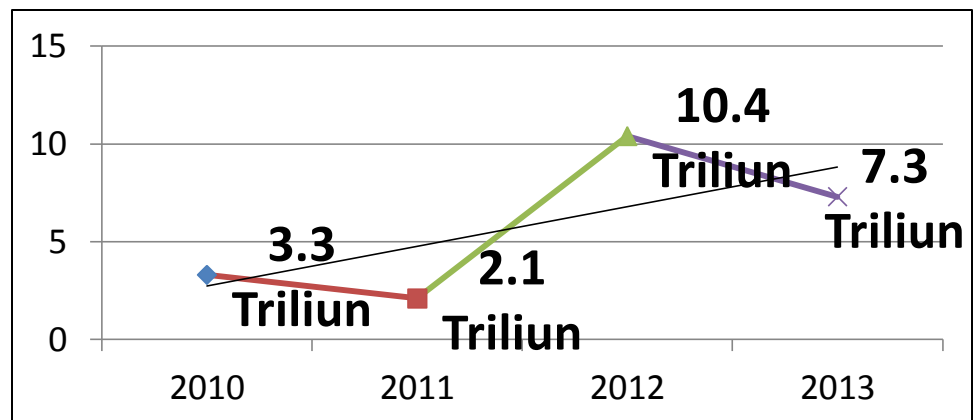
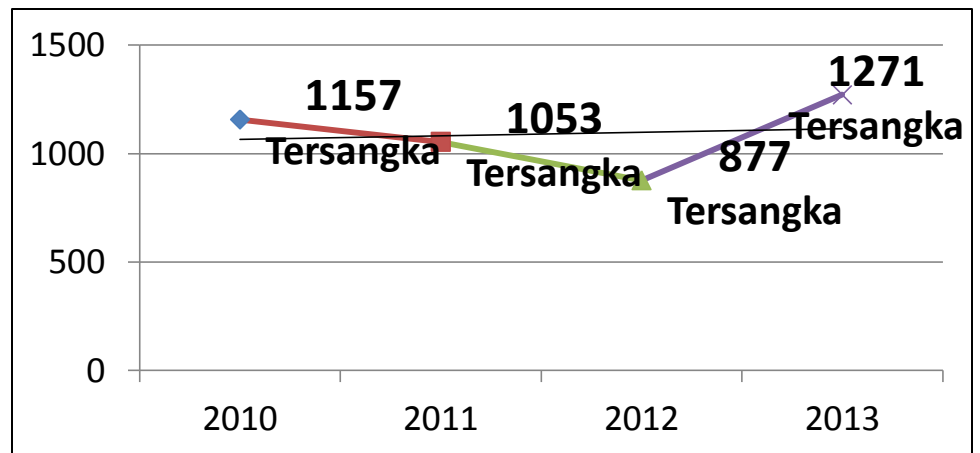
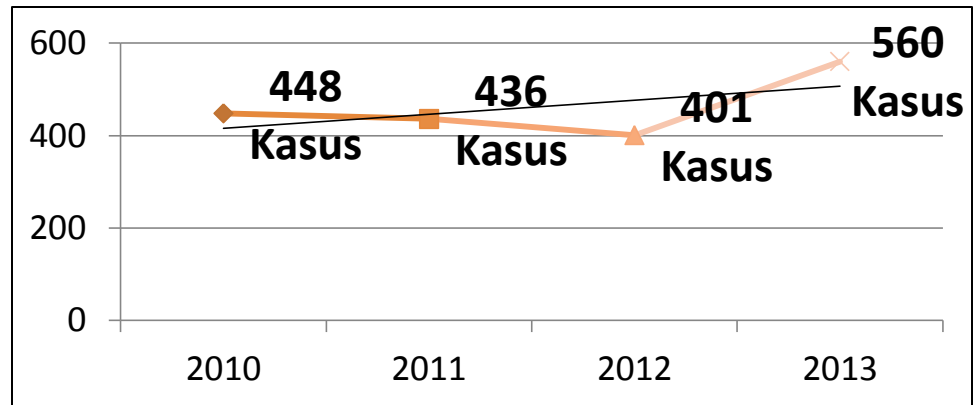
# Trend Pemberantasan Korupsi Selama 3 tahun terakhir

Periode	Smt I	Smt II	Tahun	Tahun	Smt I	Smt II
	thn	thn			thn	thn
	2010	2010	2011	2012	2013	2013
Jumlah Kasus	176	272	436	401	293	267
Kerugian Negara	2.1	1.2	2.1	10.4	5.7	1.6
	triliun	triliun	triliun	triliun	triliun	triliun
Jumlah Tersangka	441	716	1053	877	677	594
	orang	orang	orang	orang	orang	orang

*\*Catatan: database korupsi Smt II thn 2012 sedang diperbaharui kembali*

# 3 tahun pemberantasan korupsi

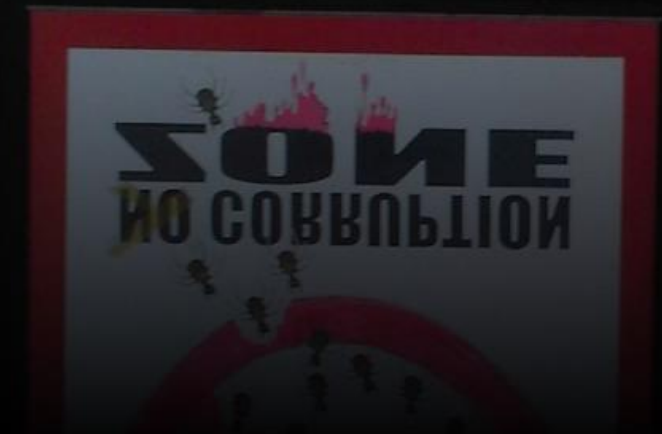
- Pemberantasan korupsi selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat.
- Peningkatan terjadi pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka.
- Kerugian negara akibat penetapan tersangka korupsi menunjukkan peningkatan dibanding 2 tahun lalu.



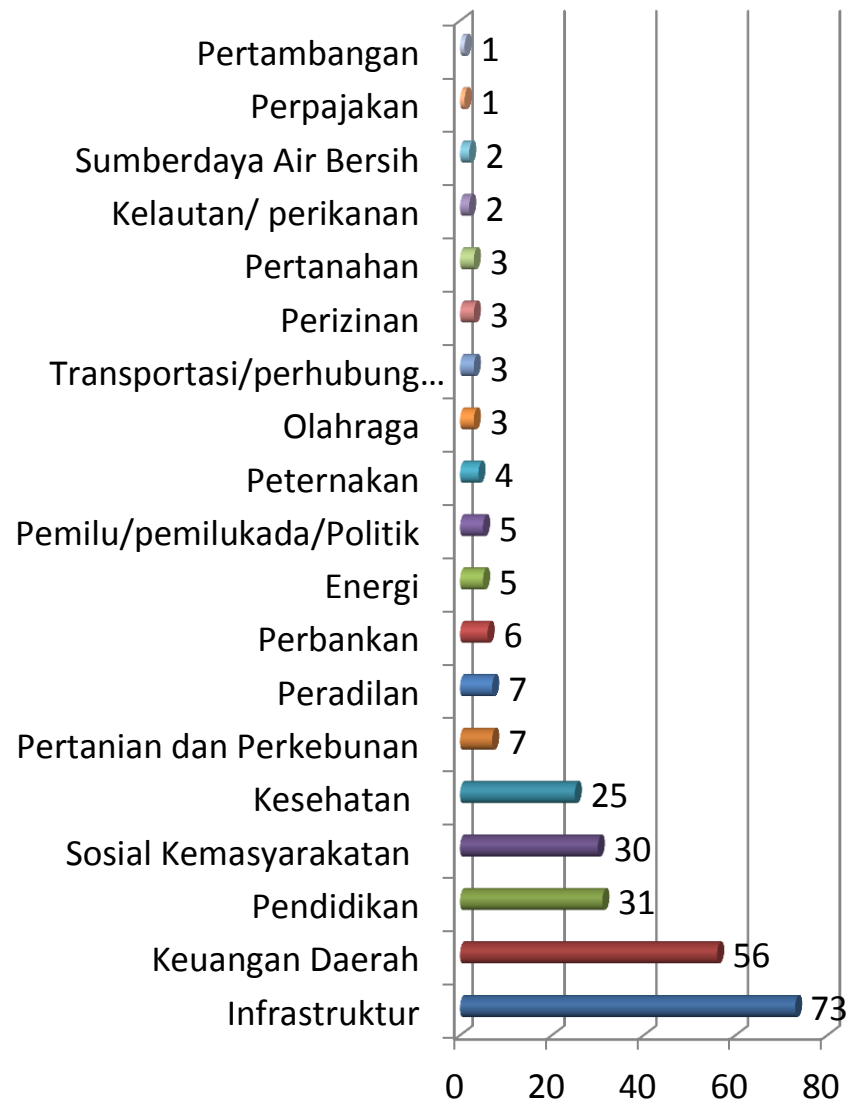
# Trend Pemberantasan Korupsi 2013

- Hasil pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum selama **2013, terpantau 560 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1271 orang dan potensi kerugian negara sebesar 7,3 Triliun rupiah.**
- Jika dibandingkan dengan tren pemberantasan korupsi tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pada sisi jumlah kasus dan penetapan tersangka, namun menunjukkan penurunan pada kerugian negara.

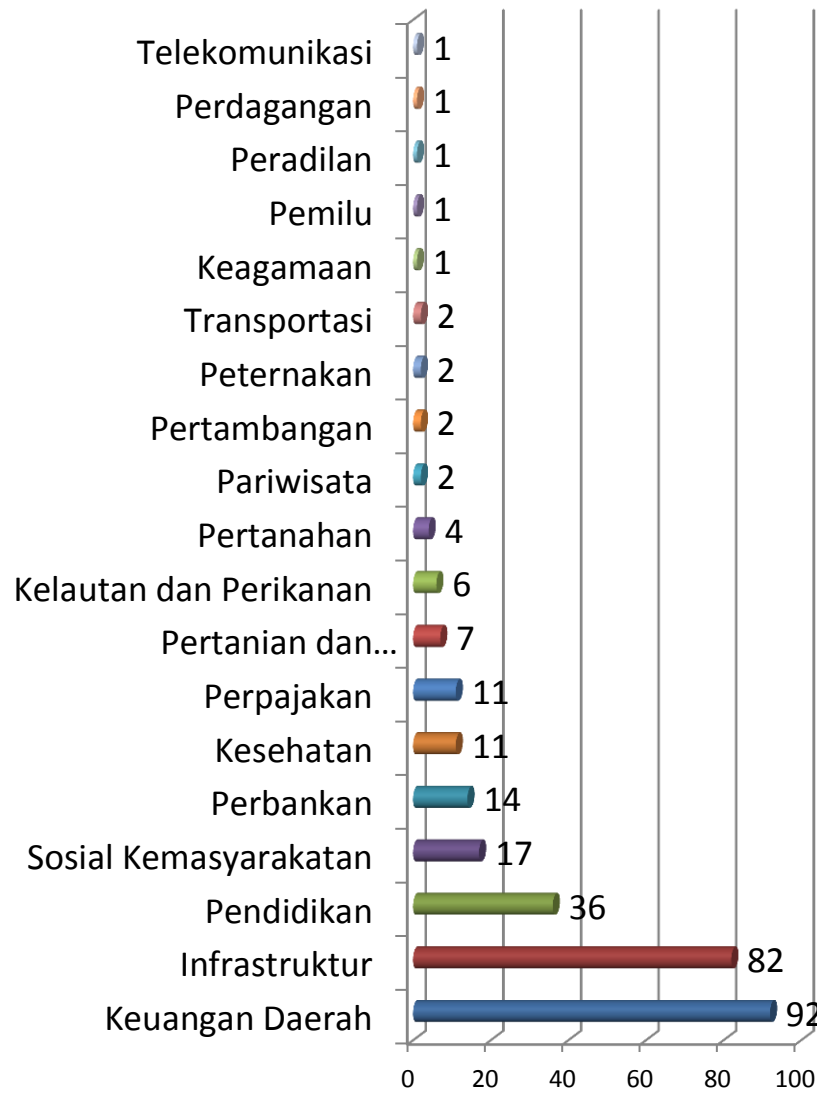
(Dok. ICW 2013)



**Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 Thn 2013**



**Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 2 Thn 2013**





# Korupsi Berdasarkan Sektor 2013

- Selama 3 tahun terakhir, pemberantasan korupsi masih belum bergeser dari sektor infrastruktur, keuangan daerah dan pendidikan.
- Pada semester II thn 2013 terjadi pertukaran peringkat. Sektor infrastruktur menggeser sektor keuangan daerah yang pada semester I thn 2013 berada di peringkat pertama.
- Penegak hukum masih fokus pada korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

# 2013: Masih Tahun Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

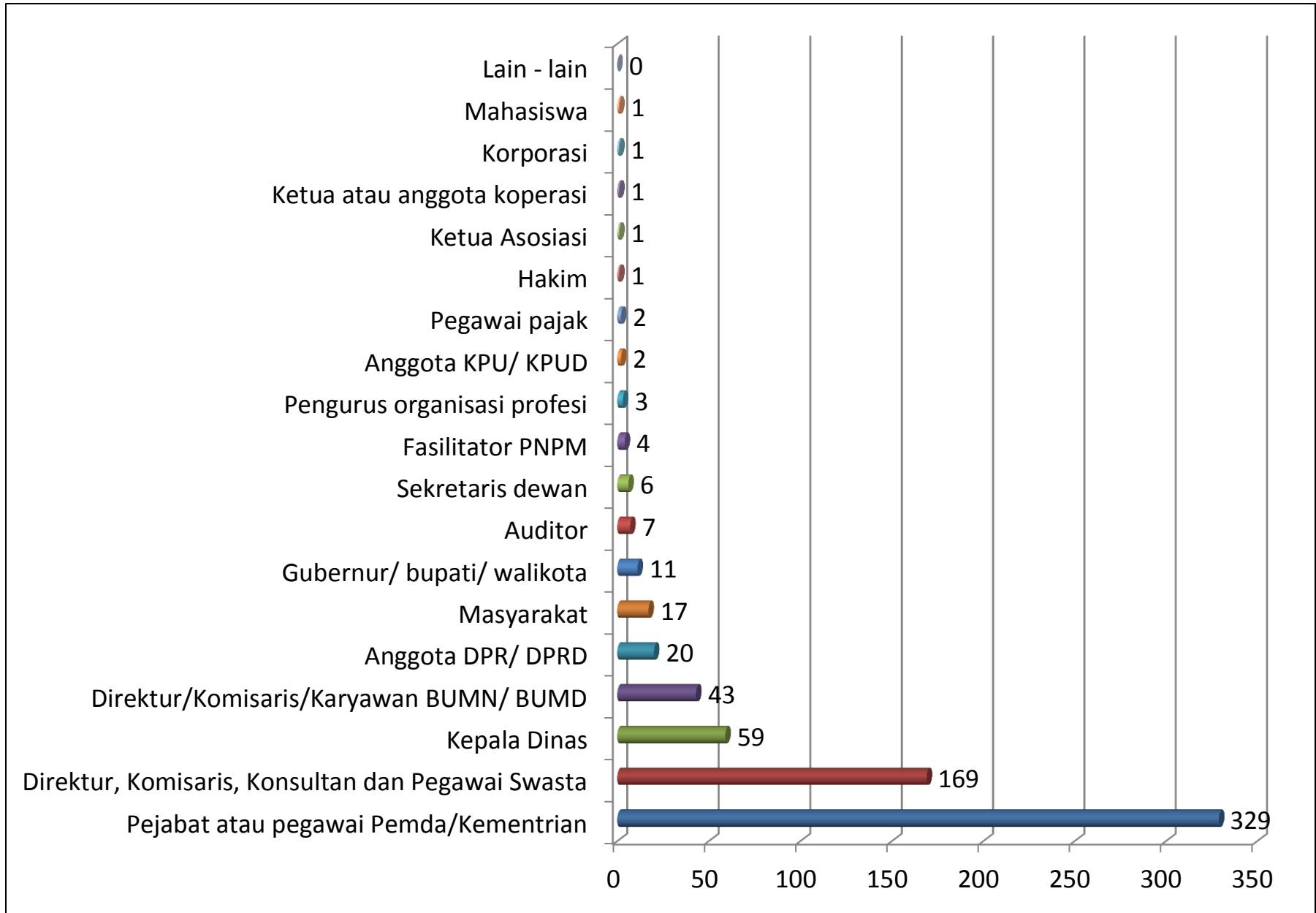
Periode/ keterangan	Semester 1	Semester 2
Jumlah kasus	293 kasus	267 kasus
Jumlah tersangka	676 tersangka	594 tersangka
Kasus PBJ	114 kasus (38,22%)	114 kasus (42,7%%)
Tersangka PBJ	314 orang (46,38%)	291 orang (48,9%)

## Tren Pemberantasan Korupsi 2013

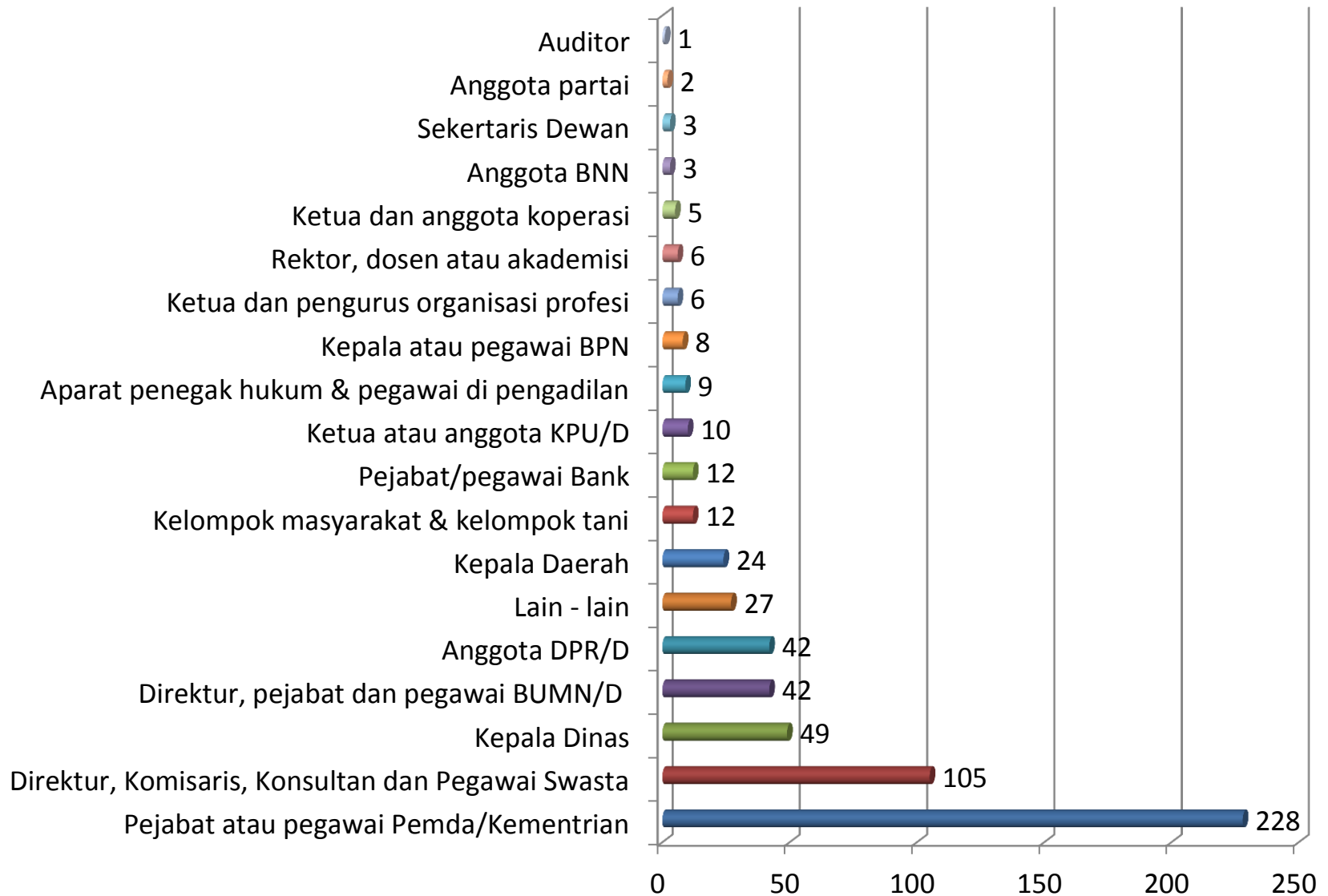
- Fokus penegak hukum masih pada korupsi sektor pengadaan barang dan jasa.
- Sekurangnya 245 tersangka (semester 1: 156, semester 2: 89) berlatar belakang panitia pengadaan barang dan jasa/ PPK/ PPTK
- Terdapat 13 kepala daerah dan 10 anggota DPR/D terjerat korupsi pengadaan barang dan jasa.



# Jabatan Pelaku Korupsi Semester 1 Thn 2013



# Jabatan Pelaku Korupsi Semester 2 Tahun 2013

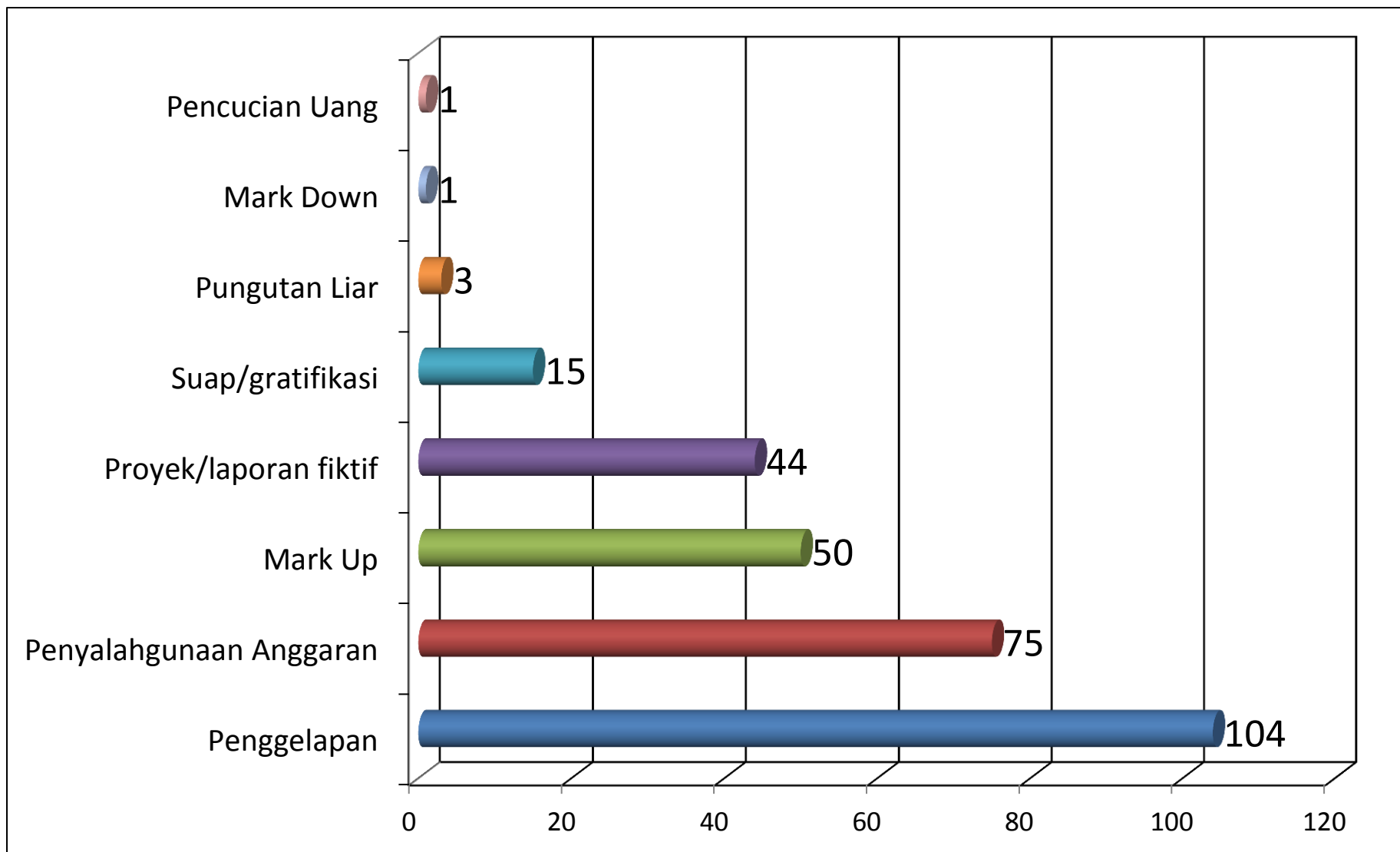


# Korupsi Berdasarkan Pelaku (Aktor) 2013

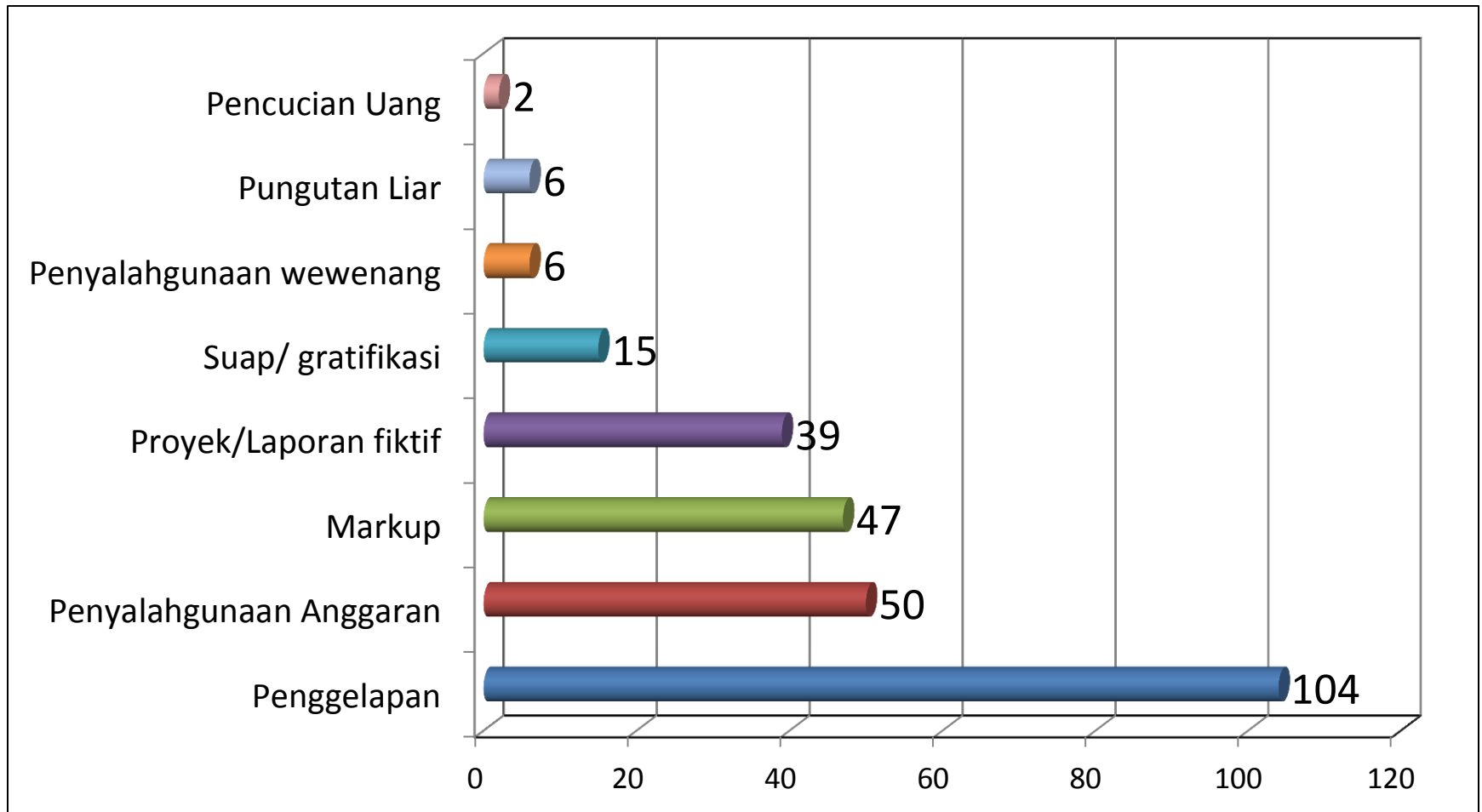
- Perbandingan pelaku korupsi antara Semester I dan Semester II masih cenderung sama. Tersangka masih didominasi kalangan:
  1. Pegawai Pemda/kementrian (557 tersangka)
  2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka)
  3. Kepala dinas (108 tersangka)
  4. Direktur/pejabat/ Pegawai BUMN/D (85 tersangka)
  5. Anggota DPR/D (62 tersangka)
- Menariknya, khusus di Semester II tahun 2013, dari 228 yang ditetapkan tersangka, 39,03% merupakan penyelenggara pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK dll.
- Aktor berlatar belakang kepada daerah dan anggota DPR/D meningkat. Tahun 2013, kepala daerah 35 tersangka dan anggota DPR/D 62 tersangka. Tahun 2012, kepala daerah 34 tersangka, dan anggota DPR/D 38 tersangka.
- Terdapat korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi (IM2). Pada pengadilan tingkat pertama dihukum membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun. Namun, pada tingkat banding divonis bebas.

*\*Catatan: terdapat kepala daerah yang dihitung ulang karena tersangka korupsi di 2( dua) kasus atau lebih.*

# Modus Korupsi Semester 1 Tahun 2013



# Modus Korupsi Semester 2 Tahun 2013



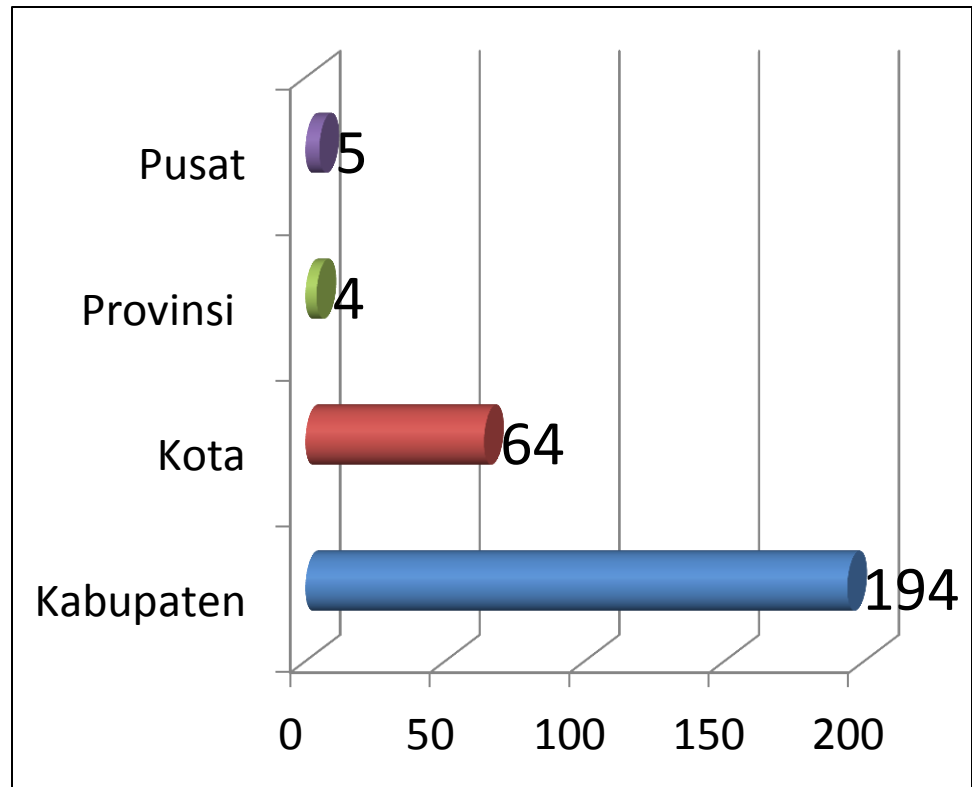


# Modus Korupsi 2013

- Selama 3 tahun terakhir, penggelapan masih menjadi modus paling sering digunakan oleh tersangka korupsi.
- Modus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum masih modus-modus konvensional.
- Tidak terjadi perubahan modus antara Semester 1 dan Semester 2 tahun 2013.

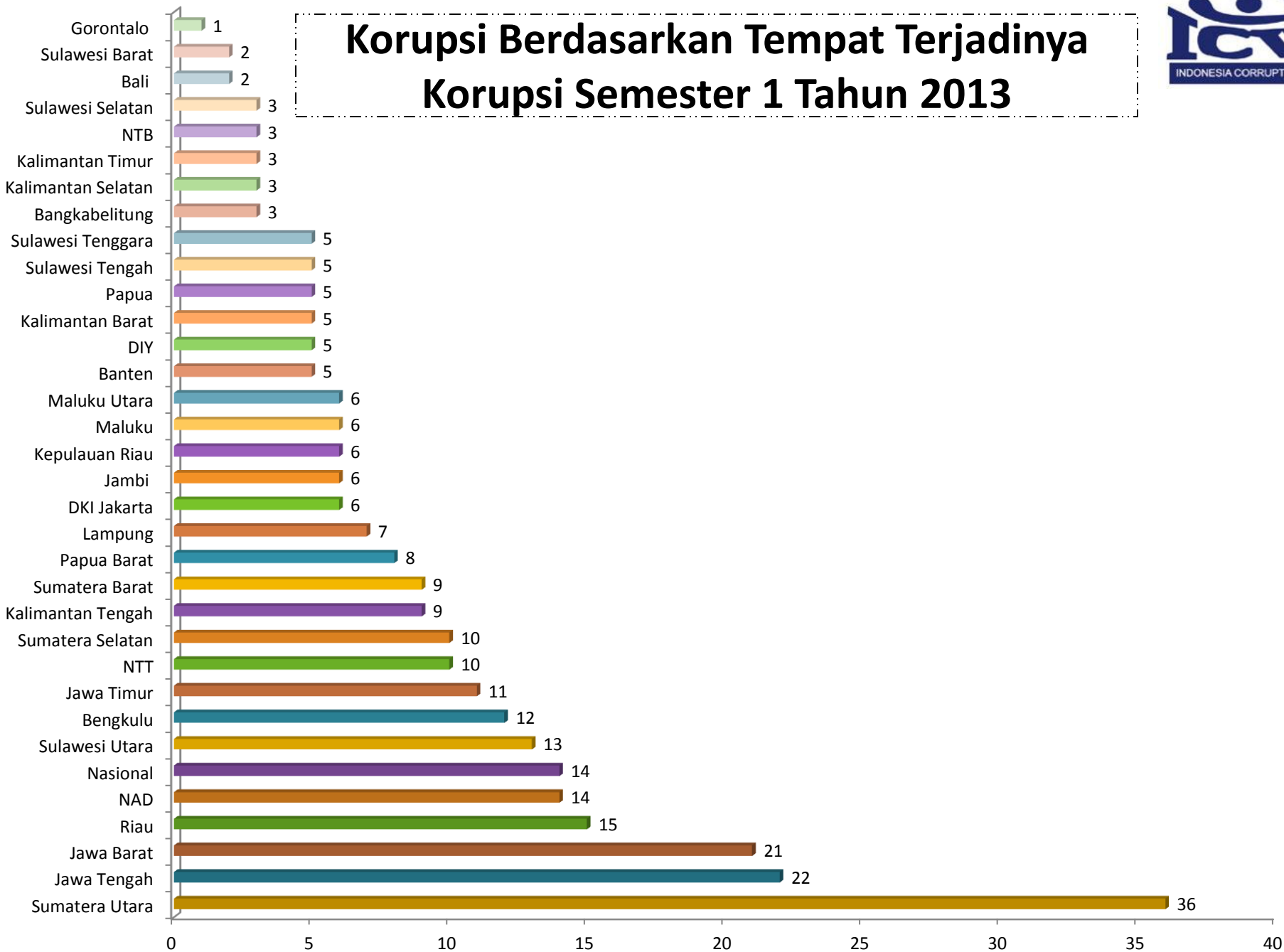
# Lokasi Pemberantasan Korupsi Semester 2 Tahun 2013

- Upaya penindakan kasus korupsi di daerah cukup tinggi.
- 98,13% pemberantasan korupsi dilakukan di daerah.

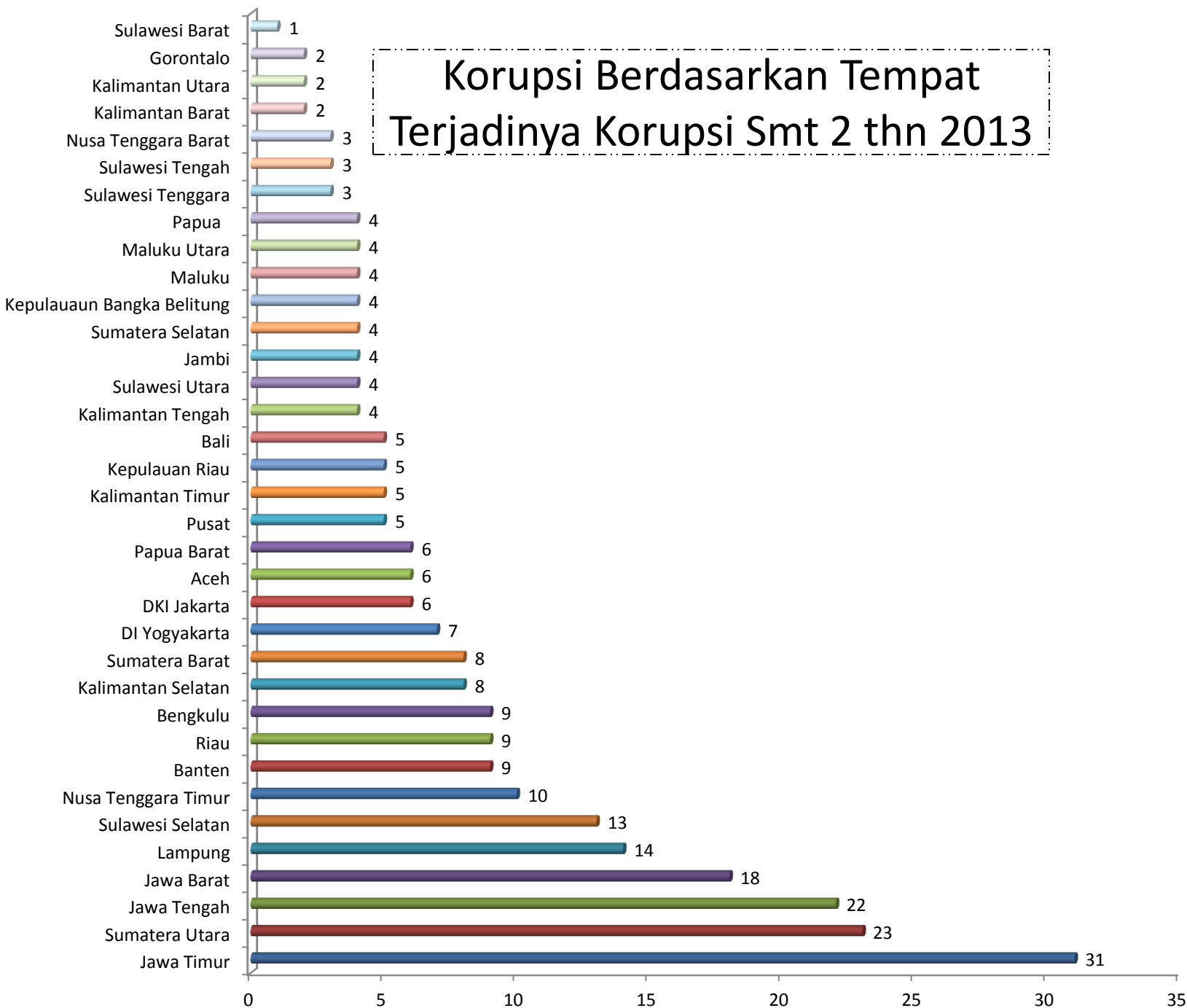


# Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya

## Korupsi Semester 1 Tahun 2013



# Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Smt 2 thn 2013

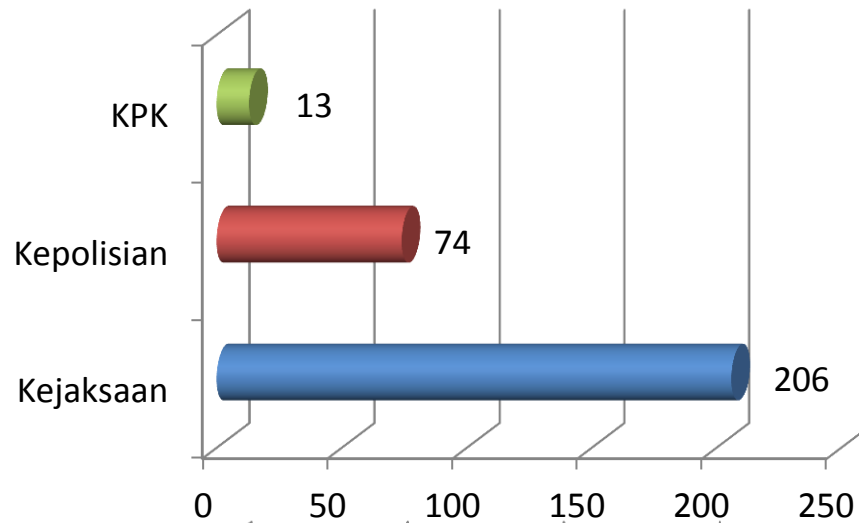


# Korupsi Berdasarkan Wilayah 2013

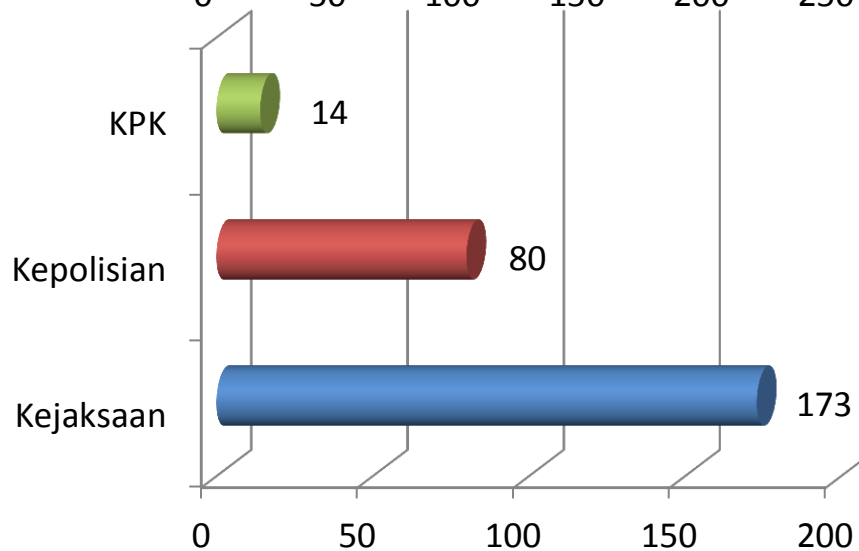
- Menguatkan dugaan terjadinya desentralisasi korupsi: dari 267 kasus korupsi, 262 kasusnya terjadi di daerah (98.12%).
- Terjadi perubahan peringkat penganganan korupsi di daerah. Sumatera Utara yang selama ini mendominasi digeser oleh Jawa Timur.

# Penanganan Aparat Penegak Hukum Tahun 2013

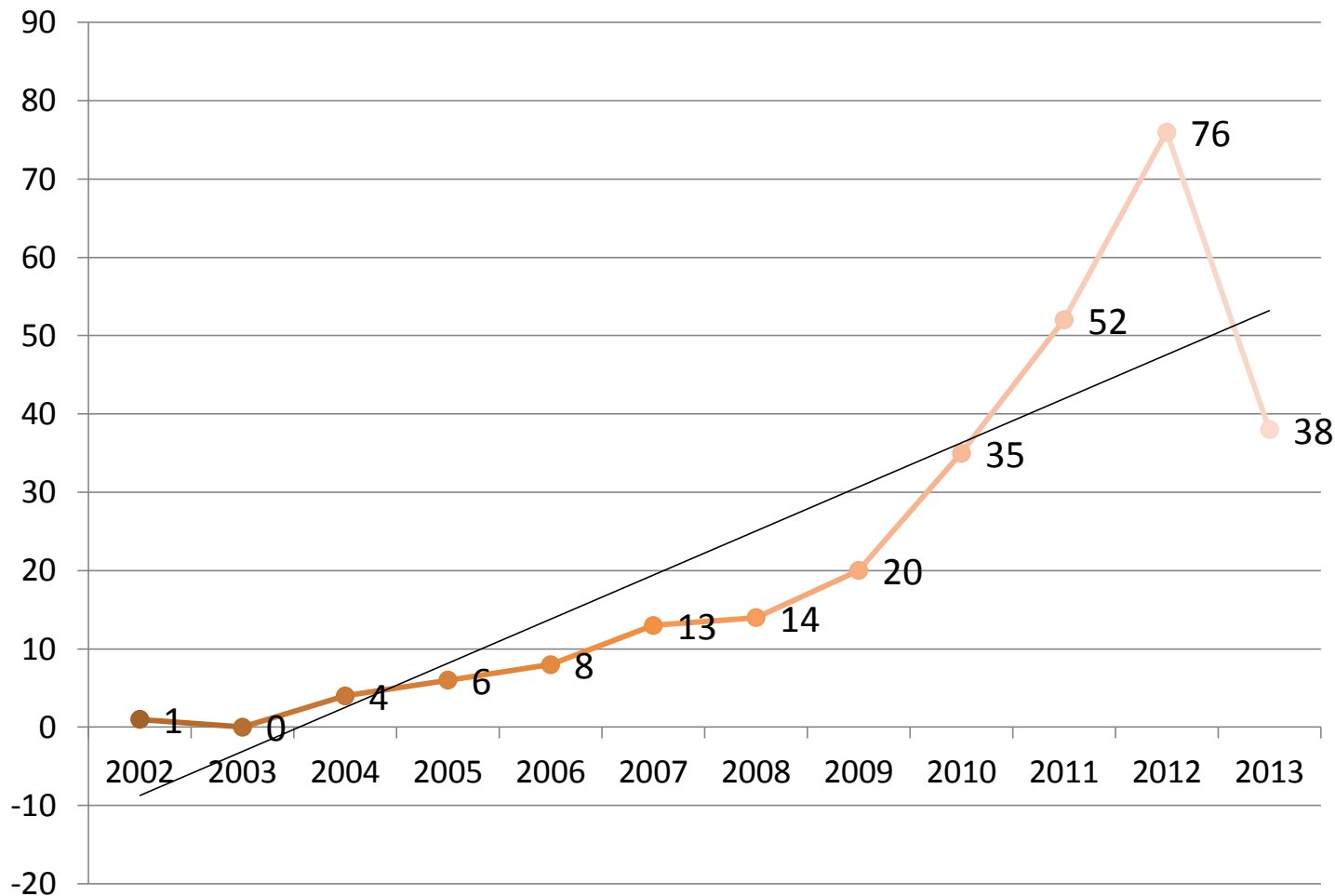
SMT 1



SMT 2



# Perkara Korupsi Berdasarkan Tahun Kejadian yang Diproses Tahun 2013

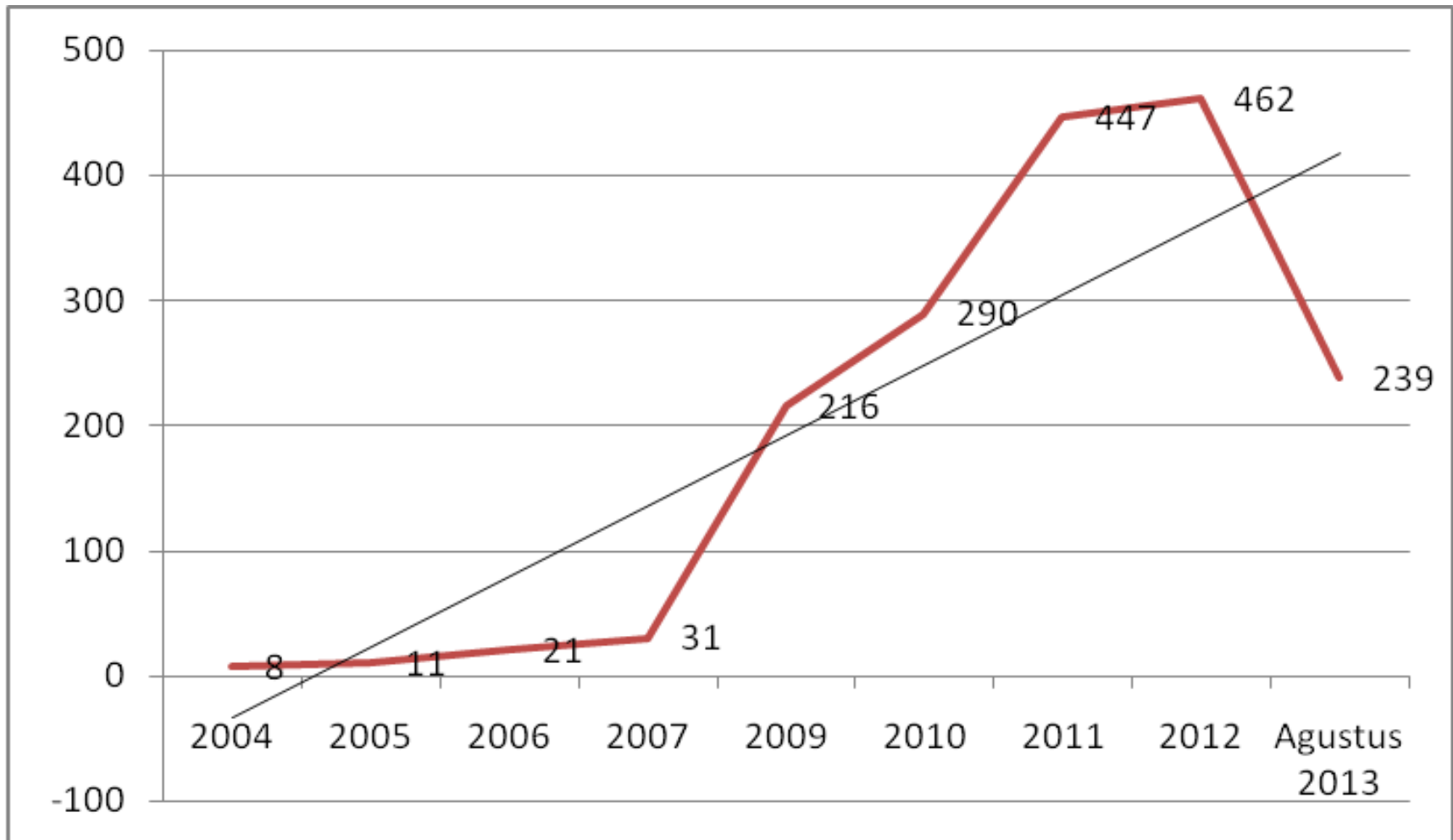


# Kinerja Aparat Penegak Hukum Bidang Penindakan Tahun 2013

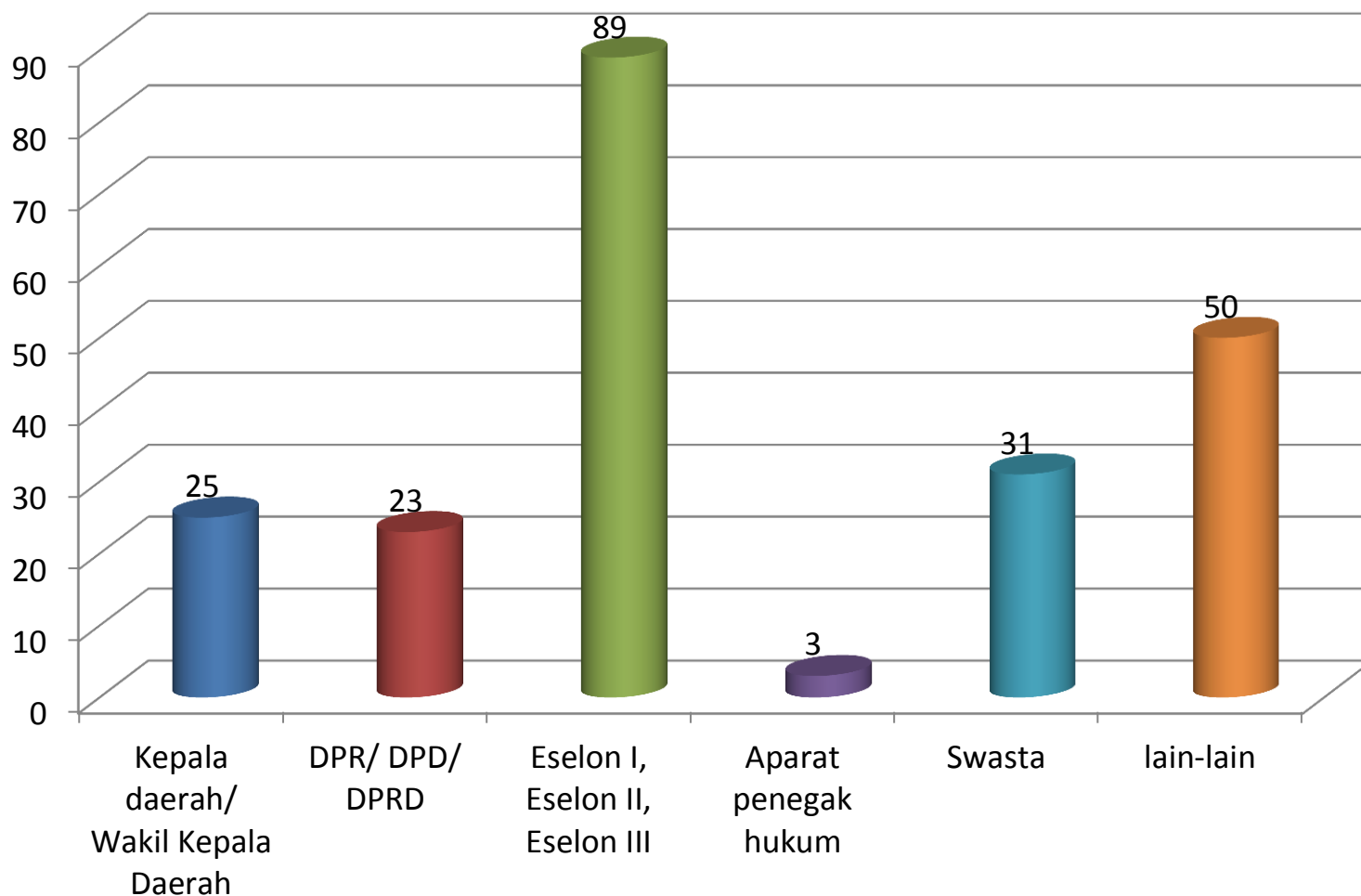
- Tidak ada perubahan peringkat semester I dan semester II 2013
- Penanganan kasus korupsi 2013 mayoritas ditangani Kejaksaan
- Kepolisian sudah masuk ke kasus sektor penerimaan negara (kasus pajak)
- Kepolisian sudah mulai melakukan OTT (operasi tangkap tangan).



# Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK

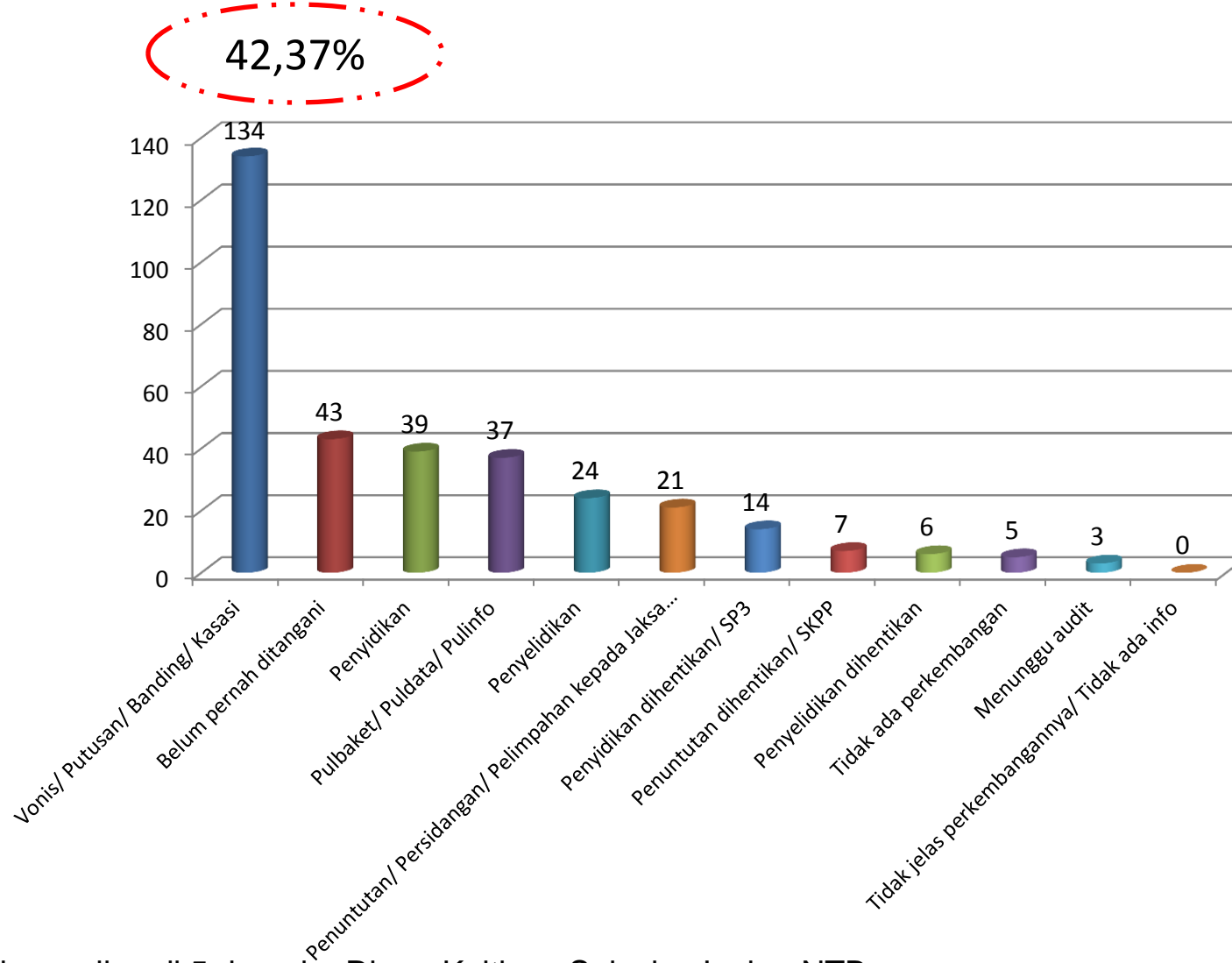


# Capaian Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK



NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB

# Aktor yang Terjerat Dalam Pelaksanaan Koordinasi-Supervisi (Korsup)



NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB

# Kesimpulan

- Pemberantasan korupsi tahun 2013 menunjukkan peningkatan secara kuantitas dan kualitas.
- Kasus-kasus yang tergolong penerimaan negara masih jarang ditangani aparat penegak hukum. Apgakum masih fokus menangani kasus sektor pengeluaran/ belanja negara. Sedangkan korupsi pada sektor penerimaan belum mendapat perhatian.
- Ada problem serius dalam proses sistem pengadaan barang dan jasa.
- Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemerintah dan swasta, tetapi juga aktor berlatar belakang politik.
- Sulit mempercayakan pemberantasan korupsi di daerah pada kepala daerah, mengingat banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka.
- Korupsi di sektor pendidikan masih mengkhawatirkan dan selalu masuk 3 besar tempat terjadinya korupsi.

# Rekomendasi

- KPK harus kembali fokus pada kasus dugaan korupsi sektor sumber daya alam dan sektor-sektor strategis lainnya
- 98,12% penanganan perkara terjadi di Daerah. KPK harus:
  - Perkuat fungsi koordinasi dan supervisi, agar kepolisian dan kejaksaan bisa makin optimal.
  - Memberdayakan aktor-aktor potensial di dalam pemerintahan untuk memperkuat pencegahan korupsi.
- Kepolisian dan kejaksaan harus meningkatkan kinerja, khususnya pada penanganan kasus korupsi di daerah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi soal peraturan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik pusat maupun di daerah.
- Perlu ada keseriusan dalam melakukan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

**Terimakasih**

